

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PREDIKSI *FINANCIAL DISTRESS* PADA KAB/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

HARMA SRI LIDIA RAHMI

2020/20043135

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

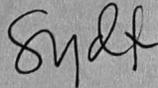
PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PREDIKSI *FINANCIAL DISTRESS* PADA KAB/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2020

Nama : HARMA SRI LIDIA RAHMI
NIM / BP : 20043135/2020
Program Studi : SI Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

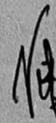
Padang, 24 Agustus 2022

Diketahui Oleh,
Ketua Program Studi Akuntansi

Disetujui oleh,
Pembimbing



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA., Ph.D.
NIP. 19800103 200212 2 001



Vita Fitria Sari, SE, M.Si
NIP. 19870515 201012 2 009

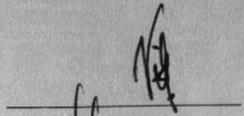
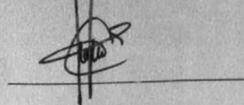
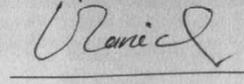
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap
Prediksi *Financial Distress* Pada Kab/Kota Di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016-2020.
Nama : HARMA SRI LIDIA RAHMI
NIM / BP : 20043135/2020
Program Studi : SI Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 24 Agustus 2022

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Vita Fitria Sari, SE, M.Si	(Ketua)	
2. Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	(Anggota)	
3. Vanica Serly, SE, M.Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Harma Sri Lidia Rahmi
Tahun Masuk/NIM : 2020/20043135
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/18 Juli 1998
Program Studi : S1 Akuntansi
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komp. Bumi Bunda Persada B/1 Balaibaru
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Prediksi *Financial Distress* Pada Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim pengujian dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 24 Agustus 2022



Harma Sri Lidia Rahmi
NIM : 20043135

ABSTRAK

Harma Sri Lidia Rahmi (20043135/2020): PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PREDIKSI *FINANCIAL DISTRESS* PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2020

Dosen Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah (Desentralisasi, Wilayah dan Kompleksitas Pemerintahan) terhadap *financial distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diolah dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dan luas wilayah serta jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode total sampling dengan sampel sebanyak 19 kabupaten/kota dengan jangka waktu 5 tahun. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua variabel karakteristik pemerintah daerah yang berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, yakni luas wilayah dan jumlah SKPD, untuk variabel desentralisasi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Kata Kunci: Keuangan Pemerintah Daerah; Karakteristik Pemerintah Daerah; *financial distress*.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat, hidayah, serta pertolongan yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul: **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Prediksi *Financial Distress* Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020”** tepat pada waktunya, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakulkarimah bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis sudah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi. Alhamdulillah dengan kun fayakunmu ya robb disertai doa allahumma yassir walla tu'asir setiap bimbingan, sesuatu yang dirasa tidak mungkin bisa dengan mudah dan lancar terlalui.
2. Teristimewa kepada papa dan mama serta yuk oca dan yuk puput yang telah memberikan kesungguhan do'a kepada penulis untuk menyelesaikan

skripsi ini.

3. Pandu El Dzaky, ponak an sholeh gemoy gagah tampan rupawan yang selalu main cilubba an ketika pulang bimbingan sehingga dapat mengurangi stress penulis selama revisian.
4. Teman-teman seperjuangan transfer akuntansi 2020 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis yakni kak rahma dan kintan.
5. Serta Rijalul muhsin, bg gilang dan bg abram yang sudah membantu dan mengajari penulis mengolah data dengan SPSS, Soon 2024 wisuda magister yaa bg. aamiin allahumma aamiin.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Atas perhatian dari semua pihak penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 24 Agustus 2022



Harma Sri Lidia Rahmi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v-vi
DAFTAR ISI.....	vii-viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teori	12
1. Teori Keagenan	12
2. Teori Kebangkrutan.....	14
3. Financial distress.....	16
4. Karakteristik Pemerintah Daerah.....	22
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Pengembangan Hipotesis	30
D. Kerangka Konseptual	34
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Populasi dan Sampel	35
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	36
F. Alat Pengolahan Data.....	40
G. Model dan Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV	44

PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	44
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	46
C. Analisis Statistik Deskriptif	53
D. Analisis Regresi	55
E. Uji Asumsi Klasik	57
F. Uji Kelayakan Model	60
BAB V.....	69
KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Implikasi Penelitian.....	69
C. Keterbatasan penelitian	70
D. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kategori Rasio Desentralisasi	24
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 <i>Financial Distress</i>	46
Tabel 4.2 Desentralisasi	48
Tabel 4.3 Luas Wilayah	50
Tabel 4.4 Jumlah SKPD	52
Tabel 4.5 Analisis Deskriptif	53
Tabel 4.6 Analisis Regresi	55
Tabel 4.7 Uji Kolmogorov Smirnov Test	57
Tabel 4.8 Uji Tolerance & Vif	58
Tabel 4.9 Uji Heterokedastisitas	59
Tabel 4.10 Uji Adjusted R	61
Tabel 4.12 Uji T	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa, informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kondisi keuangan pemerintah daerah. Kondisi keuangan yang tidak baik akan berdampak pada pemenuhan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (I. Wulandari *et al.*, 2018).

Pratiwi (2018) menyebutkan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik pada level yang layak dapat diinterpretasikan sebagai *financial distress*. Menurut Cohen & Zopounidis (2011) kondisi keuangan pemerintah yang baik itu ditandai dengan sanggupnya pemerintah membayar kewajiban keuangan dan kewajiban pelayanan kepada masyarakatnya untuk saat ini dan masa mendatang.

Tekanan *financial distress* pada pemerintah daerah dapat menyebabkan penurunan pengeluaran dalam memenuhi infrastruktur dan penurunan investasi modal untuk mendanai pengeluaran lain (Bumgarner *et al.*, 1991). Pemerintah daerah diharapkan bisa mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi

dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Dengan perencanaan yang baik dan kebijakan yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut (Hasbiullah, 2015).

Infrastruktur Kabupaten/Kota maupun Provinsi diseluruh Indonesia anggarannya banyak didominasi oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan (Syurmita, 2014). Hal ini akan mengakibatkan ketergantungan yang sangat tinggi antara pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menerapkan pelaksanaan otonomi daerah. Adanya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Zakia & Setiawan, 2021).

Namun setelah lebih dari sepuluh tahun pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia keberhasilan program ini mulai banyak dipertanyakan. Otonomi daerah yang tadinya diharapkan mampu memperbaiki masalah ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan justru menimbulkan masalah baru akibat penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Adanya temuan lembaga independen FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi) yang ikut mengawasi pelaksanaan otonomi daerah juga telah menyebutkan bahwa kini kondisi keuangan daerah cenderung kritis dan mengkhawatirkan (Pratiwi, 2014). Penyalahgunaan wewenang yang telah

diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah ditandai dengan banyaknya alokasi belanja rutin yang sifatnya kurang produktif.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh dirjen dana perimbangan mengenai potret APBD tahun 2017 (Republika.co.id), komposisi belanja modal Kabupaten/Kota di Indonesia masih dibawah persyaratan yang ditetapkan oleh PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tentang penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjelaskan bahwa porsi belanja modal minimal sebesar 30% sedangkan belanja pegawai seharusnya lebih rendah dari 30%. Namun demikian, dalam kenyataannya rata-rata belanja aparatur/pegawai lebih besar dari pada belanja modal. Rendahnya PAD dan tingginya ketergantungan pemerintah daerah pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menyulitkan pemerintah daerah untuk membuat terobosan dalam meningkatkan porsi belanja modal.

Perilaku boros pemerintah daerah yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk belanja pegawai dikhawatirkan akan mengantarkan pemerintah daerah pada kondisi kebangkrutan. Pembiaran terjadinya rekrutmen pegawai secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah akan berdampak pada berkurangnya dana untuk fasilitas publik, percepatan pembangunan daerah, penciptaan pelayanan yang berkualitas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah diamanahkan dalam kebijakan otonomi daerah (Fuad, 2018). Salah satu daerah yang memproyeksikan belanja pegawai lebih banyak dari belanja modal adalah Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat memiliki komposisi belanja modal masih dibawah 30%. Komposisi jenis belanja APBD sampai dengan tahun 2019 masih didominasi oleh belanja pegawai dengan porsi diatas 40%. Belanja modal yang identik dengan pembangunan infrastruktur justru rata-rata berada dibawah 30% dari total belanja (djpb.kemenkeu.go.id). Persentase yang dijelaskan menandakan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat masih jauh dibawah ketentuan minimal dari alokasi belanja modal yang artinya investasi pemerintah daerah masih rendah. Hal ini menggambarkan adanya resiko *financial distress*.

Ciri-ciri pemerintah yang mengalami *financial distress* selain dilihat dari belanja modal dan belanja pegawai bisa juga dilihat dari ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pokok maupun bunga pinjaman, rendahnya nilai PAD, tingginya ketergantungan dana transfer dan rendahnya *rasio operating revenue to operating expense ratio (OR/OE)* yang mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki pengeluaran yang tinggi. Dengan melihat kondisi *financial distress*, pemerintah daerah dapat menilai bagaimana kinerjanya dalam berinvestasi untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu prediksi *financial distress* sangat penting dilakukan.

Beberapa peneliti sebelumnya mengukur *financial distress* dengan menggunakan rasio belanja modal dan rasio hutang. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pengukuran *financial distress* menggunakan rasio belanja modal, karena tidak semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki hutang. Belanja modal merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun (Sudarsana, 2013). Belanja modal memiliki peran penting dalam

pelayanan publik. Semakin kecil persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal, maka akan berdampak terhadap pembangunan yang dilakukan. Sehingga, pemberian pelayanan yang memadai kepada masyarakat tidak tercapai dan probabilitas pemerintah mengalami kondisi *financial distress* akan semakin tinggi.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor keuangan dan non keuangan yang mengakibatkan *financial distress*. Faktor-faktor tersebut adalah rasio kemandirian (Fitrah *et al.*, 2021), rasio efisiensi dan efektivitas (Y. Wulandari & Indra Arza 2020), rasio solvabilitas (Syurmita, 2014), rasio solvabilitas dan efisiensi (Husniati *et al.*, 2016), kompleksitas pemerintah (Sari & Arza, 2019) dan beberapa faktor lainnya. Berdasarkan indikator faktor-faktor yang mengakibatkan *financial distress* diatas maka peneliti hanya memfokuskan pada faktor non keuangan.

Peneliti menggunakan indikator non keuangan karena penelitian terdahulu lebih dominan meneliti faktor keuangan untuk memprediksi *financial distress* dan peneliti menanggapi saran dari peneliti terdahulu untuk menggunakan faktor non keuangan dalam memprediksi *financial distress* serta dengan menggunakan faktor non keuangan bisa memperoleh hasil analisis yang lebih kompleks sebab faktor non keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan (Rianto Prasetyo, 2012). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti indikator faktor non keuangan yang bisa dilihat dari karakteristik pemerintah daerah.

Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada daerah yang menandai sebuah daerah dan membedakannya dengan daerah lain (Poerwardaminta, 2006). Penelitian ini menggunakan model karakteristik pemerintah daerah yang digambarkan dengan tingkat desentralisasi, luas wilayah dan kompleksitas pemerintah yang diproksikan dengan jumlah SKPD. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Derajat desentralisasi menggambarkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tingkat kekuatan pemerintah dalam melakukan kebijakan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.

Pemerintah daerah yang memiliki derajat desentralisasi tinggi, probabilitas untuk mengalami *financial distress* akan kecil. Karena memiliki kewenangan yang lebih banyak dalam mengalokasikan pendapatan asli daerah, dibandingkan dengan daerah yang pendapatan asli daerahnya rendah. (Zakia & Setiawan, 2021), dalam penelitiannya menemukan bahwa desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Berbeda dengan penelitian Iqbal (2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*.

Luas wilayah merupakan ruang atau kesatuan geografis yang terdiri dari beberapa unsur serta memiliki batas dan ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan aspek fungsional (Sari & Arza, 2019). Pemerintah daerah yang wilayahnya luas, maka tingkat untuk mengalami *financial distress* akan lebih

besar karena pelayanan ataupun pembangunan yang harus dilakukan juga akan lebih besar dibandingkan daerah yang wilayahnya kecil. (Wicaksono, 2015), dalam penelitiannya menemukan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap *financial distress*.

Kompleksitas pemerintah adalah kondisi beragamnya faktor-faktor di lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi (Khasanah, 2014). Penelitian ini menggunakan jumlah SKPD sebagai salah satu proksi untuk menjelaskan kompleksitas. Semakin banyak jumlah SKPD yang ada di kabupaten dan kota, maka tingkat terjadinya *financial distress* akan semakin tinggi. Karena pemerintah daerah lebih banyak memproyeksikan APBD untuk belanja pegawai dibandingkan belanja modal serta banyak tuntutan dari masyarakat untuk pemenuhan pelayanan yang lebih baik tidak terealisasi secara optimal.

Penelitian ini menggunakan jumlah SKPD sebagai salah satu proksi untuk mengukur kompleksitas pemerintah yang mempengaruhi *financial distress* di Provinsi Sumatera Barat. Sejauh pengamatan peneliti jarang penelitian yang menggunakan kompleksitas pemerintah dengan proksi jumlah SKPD untuk memprediksi *financial distress*. Faktor ini penting untuk diteliti karena banyaknya jumlah SKPD disuatu daerah akan berdampak pada pengeluaran pemerintah dalam segi belanja pegawai. Sari & Arza (2019), dalam penelitiannya menemukan bahwa kompleksitas pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Berbeda dengan penelitian (Mindiyanti *et al.*, 2017) menunjukkan bahwa kompleksitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu, penelitian-penelitian tersebut belum menunjukkan kekonsistenan dari hasil yang didapatkan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai kondisi *financial distress* dengan beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan faktor keuangan untuk memprediksi *financial distress* di pemerintahan serta menggunakan pengamatan tahun yang lebih lama karena pada umumnya penelitian terdahulu hanya menggunakan amatan satu tahun.

Penelitian ini berfokus pada variabel non keuangan dari karakteristik pemerintah daerah yang digambarkan dengan derajat desentralisasi dan luas wilayah yang mengacu pada penelitian (Sari & Arza, 2019) serta menambahkan satu variabel independen berupa kompleksitas pemerintah yang diproksikan dengan jumlah SKPD. Peneliti menggunakan 3 variabel ini karena luas wilayah dapat menggambarkan banyaknya kebutuhan sarana dan prasana dan hal tersebut berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal dengan demikian nantinya akan berdampak pada masalah *financial distress*. oleh karena itulah luas wilayah digunakan sebagai salah satu variabel untuk memprediksi *financial distress*.

Variabel desentralisasi digunakan karena desentralisasi merupakan salah satu karakteristik pemerintah. Dimana, dengan adanya desentralisasi maka akan tergambar bagaimana pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi dapat membentuk demokrasi pemerintah daerah, perbaikan ekonomi sosial di daerah, serta mencegah pemusatan keuangan. Sehingga desentralisasi dapat dikatakan sebagai ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah. Untuk variabel kompleksitas pemerintah, peneliti menggunakan proksi jumlah SKPD karena banyaknya jumlah

SKPD disuatu daerah akan berpengaruh terhadap pengeluaran belanja pegawai, dimana pemerintah akan menguras lebih banyak anggarannya untuk belanja pegawai yang dikhawatirkan akan mengantarkan pemerintah daerah pada kondisi kebangkrutan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena jika pemerintah mengalami kondisi *financial distress* maka akan berdampak terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga terjadi stagnasi dalam taraf kesejahteraan masyarakat selain itu juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi karena tidak didukung oleh pelayanan yang memadai. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Prediksi *Financial distress* (Studi Kasus Pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2016-2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana derajat desentralisasi mempengaruhi *financial distress* ?
2. Bagaimana luas wilayah mempengaruhi *financial distress* ?
3. Bagaimana kompleksitas pemerintah daerah mempengaruhi *financial distress* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh derajat desentralisasi terhadap *financial*

distress

2. Untuk mengetahui pengaruh luas wilayah terhadap *financial distress*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas pemerintah daerah terhadap *financial distress*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantara manfaatnya, yaitu :

1. Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman terhadap penulis mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap prediksi *financial distress* di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah studi literatur bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan penelitian pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap prediksi *financial distress* di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

3. Bagi Pemda

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan sekaligus acuan dalam mencermati variabel yang berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* di pemda. Sehingga, diharapkan pemda dapat mencegah terjadinya *financial distress* tersebut.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap prediksi *financial distress* di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.